

OTORITAS KEAGAMAAN NYAI PANDALUNGAN

Dinamika Otoritas Keagamaan Perempuan dalam Konteks Budaya Lokal

Fazlul Rahman

Institut Agama Islam Syarifuddin, Lumajang, East Java
fazlurahman85@gmail.com

Abstract: *This research discusses the dynamic phenomenon of the religious authority of the kiai's wives, who usually known as "nyai", in the area of Pandalungan, East Java, Indonesia. More specifically, this study highlights the problem of the subordination of nyai's religious authority, or of female ulama's in general, in the pesantren world. The fact that the glory of a pesantren is often only attributed to the leadership skills and greatness of the individual charisma of a kiai, the role of a nyai is, at this point, more often be subordinated or considered as the second actor behind the greatness of the husband's name. This problem is increasingly complex when it is faced with local cultural realities which significantly contribute to down-grading the existence of female ulama. Based on the existing theories in gender discourse, religious authority in Islam, and female psychology, this study concludes that the religious authority of women in Islam in Pandalungan is actually dynamic. Local cultural factors that are inherited from generation to generation and the psychology of a woman, in this case, become the main factor behind the gap of male and female religious authority in pesantren and of ideal-theological view of women and local culture realities in general.*

Keywords: *Religious Authority, Nyai, Pandalungan, Islam, and Gender.*

PENDAHULUAN

Kredibilitas seseorang dalam urusan keagamaan, khususnya dalam tradisi keagamaan Islam, pada suatu kehidupan bermasyarakat di Indonesia dapat dilihat dari kemampuan dan penguasaan ilmu-ilmu keislaman. Nagata dalam hal ini menambahkan bahwa kredibilitas tersebut selanjutnya akan terus meningkat jika seseorang tersebut mempunyai beberapa kemampuan lain, seperti membaca dan menjelaskan Quran dan Hadis (biasanya dengan bahasa sederhana yang mudah difahami oleh masyarakat rural), penguasaan dan kefasihan dalam bahasa dan berbahasa Arab, penguasaan hukum-hukum Islam (khususnya yang berkaitan dengan fiqh), dan juga kematangan umur.¹ Syarat-syarat

¹ Judith Nagata, "Islamic Revival and the Problem of Legitimacy Among Rural Religious Elites in Malaysia," dalam *Man*, Vol. 17, No.1 Maret (1982), 42-57.



tersebut pada dasarnya sejalan dengan karakteristik seorang da'i yang baik,² atau seorang kiai sebagai representasi dari otoritas keagamaan dalam tradisi keislaman.

Dengan penguasaan ilmu-ilmu keislaman yang dimilikinya, para kiai sering dianggap sebagai sosok yang dapat memahami keagungan Tuhan dan mampu menyingkap tabir rahasia alam, mereka dipandang sebagai sosok yang memiliki posisi ketuhanan (*divine position*) yang tentunya tidak mudah digapai, terutama bagi kalangan orang biasa.³ Mereka, di saat yang sama, adalah pemimpin keagamaan karismatik (*charismatic religious leader*), yang diyakini memiliki kemampuan khusus untuk dapat berkomunikasi dengan Tuhan dan menjadi saluran masuknya keberkahan Ilahiah dalam suatu masyarakat.

Dalam tradisi ke-kiai-an, adalah hal yang disepakati bersama bahwa anak-anak keturunan kiai secara natural akan mewarisi 'kerajaan' bapaknya. Karenanya, banyak terlihat apresiasi dan kepatuhan masyarakat tidak hanya sebatas pada sosok kiai, tetapi juga termasuk kepada seluruh anggota keluarga karena dipercaya bahwa yang memiliki keberkahan tidak hanya kiai saja, melainkan seluruh anggota keluarga. Posisi nyai dalam hal ini sesungguhnya sama. Para nyai sejatinya memiliki peran yang tidak kalah signifikan dalam kehidupan pesantren. Mereka juga memiliki kredibilitas di bidang agama yang tidak kalah baiknya dengan suami mereka para kiai, Bahkan, anak-anak keturunan keluarga kiai dipercayai mewarisi kesalehan dan keberkahan tidak hanya dari bapak mereka tapi juga ibu.⁴

Pertanyaan yang muncul dari fenomena solidnya otoritas seorang kiai di dunia pesantren adalah bagaiman peran para istri kiai, atau biasa dikenal dengan sebutan nyai, yang seakan tidak nampak di permukaan? Kejayaan suatu pesantren seringkali hanya dinisbatkan kepada kepiawaian kepemimpinan sosok sang kiai. Kiprah seorang nyai lebih sering menjadi actor nomor dua di belakang kebesaran nama sang suami. Karena hal tersebut tidak mungkin terjadi tanpa izin dan restu dari pihak kiai.⁵ Artikel ini bertujuan untuk membahas permasalahan tersebut secara mendalam dengan berfokus pada studi kasus nyai Pandalungan.

² Seorang dai yang baik haruslah menguasai ilmu-ilmu keislaman (baik dari ilmu Quran, tafsir, hadith, balaghah, dll) serta memiliki kepribadian yang baik. Lihat: Muhammad Amhazun, *Manhaj al-Nabi fi Da'wah min Khilaf al-Sirah al-Sahihah* (Cairo: Dar al-Ssalam, 2003), 'Abdullah Nasyih 'Ulwān, *Silsilah Madrasah al-Du'at* (Cairo: Dar al-Ssalam, 2004), 'Abd al-Karim Zaydan, *Ushul al-Da'wah* (Beirut: Mu'assah al-Risalah, 2001).

³ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1982), 56.

⁴ Bianca J. Smith and Mark Woodward, "Introduction: de-colonizing Islam and Muslim feminism," dalam Bianca J. Smith and Mark Woodward (eds.), *Gender and Power in Indonesian Islam: Leaders, Feminists, Sufis and Pesantren Selves* (Routledge, 2013); Eka Srimulyani, *Women from Traditional Islamic Educational Institutions in Indonesia: Negotiating Public Spaces* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012).

⁵ Fahmi Muhammad Ahmadi, "Ibu Nyai dan Perubahan Sosial Pesantren: perempuan dalam struktur sosial pesantren AlMunawwir Krapyak Yogyakarta" (Tesis—Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2002).

OTORITAS KEAGAMAAN PEREMPUAN DAN PESANTREN

Dalam diskursus otoritas keagamaan dalam Islam, banyak kritik bermunculan terhadap pandangan yang mendeskreditkan peran dan kredibilitas otoritas keagamaan perempuan. Amina Wadud, misalnya, melihat bahwa laki-laki dan perempuan adalah dua kategori spesies makhluk yang memiliki konsiderasi dan potensi yang sama atau setara.⁶ Setiap mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama baik dalam level etika keagamaan maupun fungsi sosialnya.⁷ Barlas dalam hal ini secara lugas memperingatkan Umat Muslim untuk tidak melihat agama Islam sebagai agama patriarkal. Menurutnya, ajaran-ajaran al-Quran sangatlah bersifat egaliter bahkan anti terhadap patriarki.⁸ Walau demikian, kultur patriarkal yang melekat di masyarakat Arab saat turunnya al-Quran pada akhirnya menjadikan kandungan al-Quran banyak berisi wacana dan pesan khusus pada audiens laki-laki, sehingga pemahaman model patriarkis terhadap kandungan al-Quran sangat sulit dihindari.⁹ Salah satu contoh kandungan al-Quran yang terkesan patriarkis adalah ayat 34 dari surat an-Nisa:

الرجال قوامون على النساء...

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri)...”

Terlepas dari berbagai pemahaman ayat yang mendeskreditkan perempuan, menarik menyimak penjelasan Faishol tentang pemaknaan yang lebih humanis yang diungkapkan Abu Hayyan Al-Andalusi terkait ayat tersebut dalam karyanya Tafsir Bahr al-Muhith, ia menyimpulkan bahwa:

pengertian *rajul*, sebagaimana dalam ayat 34 surat al-Nisa', mengacu pada pemaknaan social-kultural. Implikasinya, konsep *qawwām* bisa berlaku untuk semua jenis kelamin (gender). Baik seorang laki-laki maupun perempuan, masing-masing sama-sama memiliki peluang untuk bisa menjadi *qawwām* di tengah rumah tangga jika sifat ke-*rajul*-an benar-benar ada dan dimiliki oleh setiap orang. Seorang *rajul* akan menjadi *qawwām* di tengah keluarga jika ia betul-betul *rajul*.¹⁰

Patriarki yang secara garis besar difahami sebagai sebuah struktur social, ideologi atau system kepercayaan, di mana laki-laki memiliki superioritas sejatinya agama turut berperan signifikan dalam memunculkan serta mengabadikan ideologi tersebut. Menurut Bhasin, agama telah menyebar konsep-konsep mengenai superioritas laki-laki melalui cerita seperti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, dll.¹¹ Dalam hal ini, Nasaruddin Umar turut mengamini bahwa mitos-mitos tentang, misalnya, penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki memunculkan kesan bahwa perempuan adalah makhluk kedua

⁶ Amina Wadud, *Quran and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: xford University Press, 1999), 15.

⁷ Amina Wadud, *Quran and Woman...*, 102.

⁸ Asma Barlas, “Believing Women” in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur’an (Austin: University of Texas Press, 2002), 93.

⁹ M. Faishol, *Hermenutika Gender: Perempuan dalam Tafsir Bahr al-Muhith* (Malang: UIN-MALIKI Press, 2011), 11.

¹⁰ M. Faishol, *Hermenutika Gender...*, 101.

¹¹ Kamla Bhasin, *Memahami Gender*, terj. M. Z. Hussein (Jakarta: Teplok Press, 2001), 28.



(*second creation*). Pengaruh mitos-mitos tersebut kemudian mengendap dan terwarisi sekian lama di masyarakat sehingga pada akhirnya perempuan menerima kenyataan diri mereka sebagai subordinasi laki-laki.¹²

Hal ini kemudian diperparah dengan turut munculnya mitos-mitos tersebut di dalam Kitab Suci sehingga menjadikannya sebuah keyakinan yang terlegitimasi secara teologis.¹³ Terkait hal ini, menarik untuk diungkapkan bahwa misoginisme dalam Islam justru muncul melalui kitab-kitab tafsir dan hadis. Dalam konteks ini, penulis berpendapat bahwa walaupun terdapat teks-teks keagamaan dalam Islam yang terkesan mendukung pandangan patriarkal dan misoginisme, pada dasarnya Islam memposisikan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama. Hal ini sejalan dengan ajaran inti dalam Islam yaitu tauhid. Menurut Fazlur Rahman, ajaran ke-tauhid-an harus difahami dalam konteks etika social, di mana ketundukan dan kepasrahan hanya ditujukan kepada Tuhan semata. Seseorang tidak dibenarkan merasa memiliki martabat lebih tinggi dari lainnya sehingga dengannya ia berbuat semena-mena, karena hal tersebut bertentangan dengan ajaran tauhid.¹⁴

Walaupun secara teologis, Islam tidaklah mendukung pandangan-pandangan patriarkis, namun sebagai sebuah budaya yang terkonstruksi, budaya patriarki masih terasa di dunia pesantren. Dalam diskusinya mengenai diskursus gender di dunia pesantren, Srimulyani mengungkapkan bahwa sebagai sebuah institusi, pesantren sering dikritik karena tradisi patriarkal yang melekat di dalamnya. Mengutip pendapat Musdah Mulia yang mendukung kentalnya tradisi patriarki dalam pesantren, bahwa tradisi tersebut dapat dilihat jelas dari buku-buku yang digunakan di pesantren tentang kehidupan berkeluarga dan kehidupan social laki-laki dan perempuan yang kebanyakan menyampaikan kesan patriarkis serta menempatkan perempuan terbatas pada urusan domestic. Hal ini, menurut Srimulyani tidak hanya tercermin dalam kurikulum pembelajaran, namun sudah mengakar dalam struktur sebuah sistem kepemimpinan yang diakui di dalamnya.¹⁵

AKAR PROBLEMATIKA OTORITAS KEAGAMAAN PEREMPUAN DI DUNIA PESANTREN

Sebelum mengkaji lebih dalam tentang otoritas keagamaan, pada sub bahasan ini peneliti akan menguraikan profil para nyai Pandalungan yang menjadi informan kunci dari penelitian ini. Data dalam pemaparan ini dihasilkan dari wawancara peneliti dengan para informan pada beberapa kesempatan yang berbeda. Para nyai yang berhasil peneliti wawancarai adalah: nyai Hj. Hamdanah (Ponpes Shofa Marwa, Jember Kota), nyai Hj.

¹² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), 88.

¹³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), 89.

¹⁴ Fazlur Rahman, *Islam* (The Chicago University Press: 1979).

¹⁵ Eka Srimulyani, *Women from Traditional Islamic Educational Institutions in Indonesia: Negotiating Public Spaces* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012), 90.

Najmatul Millah (Ponpes Nurul Jadid, Jember Utara) dan nyai Luluk Masluhah (Ponpes Darul Muqomah, Jember Selatan), dan nyai Hj. Nur Azizah Ghofur (PP. Al-Mujtama', Pamekasan). Dengan pertimbangan bahwa permasalahan otoritas keagamaan perempuan di dunia pesantren sangat erat kaitannya dengan sosok kiai, maka penelitian ini juga mewawancarai seorang kiai, yaitu KH. Moh. Darwis (PP Kiai Syarifuddin, Lumajang).

Pada sub bahasan ini, peneliti akan menjabarkan profil para nyai Pandalungan: gambaran singkat keluarga, latar belakang pendidikan, kiprah di dunia pendidikan dan masyarakat, serta pandangan-pandangan mereka tentang ke-nyai-an di dunia pesantren dan otoritas keagamaan perempuan secara umum. Dari pemaparan ini, dapat terlihat muara permasalahan otoritas keagamaan sosok nyai sebagai seorang perempuan di dunia pesantren.

NYAI HJ. HAMDANAH: SOSOK INTELEKTUAL DAN ULAMA PEREMPUAN PEJUANG KESETARAAN GENDER

Nyai Hj. Dr. Hamdanah, M.Hum, lahir di Banyuwangi 7 Oktober 1966. Beliau mendapatkan gelar S1 pada tahun 1989, kemudian lulus S2 dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2003. Pada tahun 2017, beliau melengkapi kapasitas keilmuannya dengan meraih gelar doctor dari kampus Universitas Jember. Karir akademis nyai pengasuh Pondok Pesantren Sofa Marwa ini bisa dikatakan sangat gemilang. Beberapa penghargaan riset bergengsi pernah diraihinya, di antaranya: *research award* RPKK PPK UGM (1998), *research award* RUKK IV Deputy Bidang Riset IPTEK Kantor Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia (2006), dan Karya Ilmiah Terbaik dosen Dirjen Pendidikan Islam DEPAG Republik Indonesia (2006).

Kapasitas keilmuan sosok ibu dari empat orang anak ini, khususnya di bidang studi gender tidak bisa diragukan. Hal ini terlihat jelas dari berbagai penelitian tentang isu terkait yang pernah dilakukannya (di antaranya: penelitian tentang *Pandangan Kyai tentang Kesehatan Reproduksi Perempuan di Madura* kerjasama PPK UGM dan Ford Foundation pada tahun 1977, *Poligami, Pintu Daruratkah? Debat Tokoh Agama Islam tentang Poligami* kerjasama PPK UGM dan Ford Foundation tahun 2002, *Pandangan Ulama Perempuan tentang Hak-hak Kesehatan Reproduksi Perempuan di Kabupaten Jember* kerjasama dengan Ford Foundation tahun 2002 dan *Pesantren Gender, Studi Kasus Rekonstruksi Tiga Pesantren di Jawa sebagai Basis Pemberdayaan Perempuan* kerjasama dengan Kementerian Riset dan Teknologi tahun 2003-2005), serta karya-karya beliau yang telah dibukukan (di antaranya: *Hak Reproduksi Perempuan dalam Pandangan Kiai* tahun 1999, *Musim Kawin di Musim Kemarau* tahun 2005, dan *Marital Rape di Kampung Nelayan* tahun 2005).

Selain sebagai intelektual, Nyai Hamdanah yang pindah ke Jember pada tahun 1983 ini juga sosok aktivis yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Saat ini beliau aktif di organisasi Muslimat dan LSM Sakinah yang berkonsentrasi kepada masalah kesehatan reproduksi perempuan dalam persepektif Islam. Beliau juga mengabdikan diri di masyarakat dengan memberikan beberapa kajian rutin, dari tingkat RT, RW maupun kabupaten Jember, yang dihadiri sebagian besar oleh para ibu-ibu dan sebagian kecil bapak-bapak.





Nyai Hamdanah dan suami, Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, MA (ketua MUI Jember dan guru besar bidang ilmu Pendidikan Islam IAIN Jember) mendirikan pondok pesantren yang diberi nama pondok Shofa Marwa berlokasi di Jalan Kalisat, Desa Patemun, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember. Profil singkat keilmuan, keluarga, serta pengabdian masyarakat sosok seorang Nyai Hamdanah, sekilas mencerminkan profil seorang intelektual dan ulama perempuan ideal yang sangat tepat untuk dijadikan informan kunci dalam penelitian ini.

NYAI HJ. NAJMATUL MILLAH: SOSOK AKTIVIS DAN ULAMA PEREMPUAN DARI SUMBERWRINGIN

Nyai Hj. Najmatul Millah, S.Pd.I lahir dari orang tua yang memang berasal dari keluarga kiai di daerah Lumajang: Nyai Hj. Umi Hannah Adrai Syarif dan KH. Abdul Ghoni Halim yang konon keduanya berasal dari keturunan Madura. Nyai Najma menyatakan dirinya sesungguhnya bukan orang Pandalungan, beliau adalah keturunan Madura yang tinggal di lingkungan masyarakat Pandalungan. Beliau dan keluarga memutuskan menetap di Jember sejak tahun 2007.

Nyai Najma memulai Pendidikan dasarnya di daerah Wonorejo, Lumajang, kemudian melanjutkan Pendidikan tinggi di kampus Universitas Islam Negeri Malang dan mendapatkan gelar S1 di bidang Pendidikan Agama Islam. Ia kemudian melanjutkan studi strata duanya di kampus Institut Agama Islam Negeri Jember.

Selain kegiatan sehari-hari sebagai pengajar dan pengasuh di rumah maupun di pesantren, nyai Najma juga aktif di beberapa kegiatan di masyarakat. Saat ini beliau aktif sebagai pengurus Fatayat NU Cabang Jember Bidang Organisasi, FORDAF NU Cabang Jember, ketua 3 majlis ta'lim di desa sumber wringin, dan juga sebagai ketua yayasan ma'had Nurul Jadid al-Islami.

NYAI HJ. LULUK MASLUHAH: SOSOK IBU DAN ULAMA PEREMPUAN DARI KENCONG

Nyai Luluk Masluhah merupakan putri pertama dari KH. Syuhada yang merupakan generasi ketiga dari pendiri pondok Darul Muqomah, Kencong, Jember. Pondok Darul Muqomah sendiri berada di bawa naungan yayasan Darul Muqomah yang berdiri pada tahun 1992. Yayasan tersebut saat ini menaungi beberapa unit PAUD, RA, SMK, serta pondok pesantren. Nyai Luluk sendiri merupakan pendiri dan kepala SMK sejak tahun 2009-2010 dan saat ini mengepalai unit RA sejak tahun 2013.

Nyai Luluk, berdasarkan pengakuannya, merupakan orang Pandalungan. Karena ibunya berasal dari Jawa sedangkan ayahnya berasal dari Madura. Masa kecil nyai Luluk banyak dihabiskan di lingkungan pesantren Tebuireng Jombang, karena sang ayah, KH. Syudaha, saat itu mengabdikan sebagai pengajar di pesantren tersebut. Ia pun memulai Pendidikan dasarnya dari TK hingga SD di Tebuireng Jombang. Kemudian ketika keluarga pindah ke Lumajang, ia meneruskan Pendidikan MTs dan MA di Pondok Kiai Syarifuddin. Nyai Luluk meneruskan Pendidikan tingginya di Institut Agama Islam Negeri Surabaya, serta termasuk orang pertama dalam keluarga besar yang meneruskan ke jenjang strata dua di kampus yang sama.



Dalam bidang organisasi, Nyai Luluk sempat aktif menjadi jurnalis, aktif juga di PMII. Karena profesi beliau saat ini juga sebagai PNS guru di daerah Kencong, maka beliau pun aktif di PGRI dan Darmawanita Kemenag Jember. Selain kegiatan sebagai guru, Nyai Luluk saat ini lebih disibukkan dengan mengurus keluarga dan mengayomi kegiatan di pondoknya.

NYAI HJ. NUR AZIZAH GHAFUR

Nyai Azizah merupakan putri dari KH. Abd. Ghafur, pendiri serta pengasuh Pondok Pesantren Al-Mujtama,' Plakpak, Pengantenan, Pamekasan Madura. Keluarga besar Nyai Azizah merupakan keluarga kiai yang mendirikan beberapa pesantren di Madura. Sebagai seorang putri pengasuh pesantren yang menaungi beberapa unit pendidikan unit pendidikan formil maupun non formil, dari PAUD hingga perguruan tinggi, nyai Azizah dibekali dengan keilmuan yang didapatinya dari mulai pendidikan dasar hingga jenjang magister. Beliau menyelesaikan jenjang SI dari fakultas Dirasat Islamiyyah, Universitas Islam Negeri Jakarta. Semasa studinya tersebut, beliau juga pondok dan memperdalam keilmuan hadis di Perguruan Tinggi Ilmu Hadis Darus-Sunnah dibawah bimbingan KH. Ali Mustafa Ya'qub. Nyai Azizah meneruskan studi S2nya di UIN Surabaya dan saat ini sedang menyelesaikan studi doktoralnya di kampus yang sama. Selain kesibukan menimba ilmu untuk diri sendiri, nyai Azizah juga banyak terlibat dalam banyak kegiatan pengelolaan dan pengajaran di pondok yang dipimpin oleh ayahandanya.

KH. MOH. DARWIS, M.PD.I

Lahir dari keluarga keturunan Madura yang memiliki pesantren di Pamekasan pada bulan Juni 12, 1978, Kiai Darwis memulai pendidikan awalnya di sebuah pesantren yang dimiliki keluarganya dibawah bimbingan langsung ayahandanya. Beliau tinggal di Madura hingga menyelesaikan jenjang pendidikan sekolah menengah dan pindah ke Jawa untuk menyelesaikan pendidikan Stratat satunya di Pesantren Kraksaan Probolinggo. Ia kemudian pindah ke Surabaya untuk mengambil gelar Masternya dan saat ini beliau sedang menyelesaikan studi Doktoralnya di UIN Sunan Ampel.

Saat ini, selain menjadi anggota dewan kiai di Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin, beliau juga menjabat sebagai pimpinan asosiasi Huffaz al-Quran (Penghafal al-Quran) NU cabang Lumajang. Dalam organisasi NU cabang Lumajang, beliau saat ini merupakan anggota komisi pengajaran area Lumajang dan juga wakil kepala Syuriah dalam Majelis Wakil Cabang NU, untuk area Kedungjajang.

EKSISTENSI KE-NYAI-AN DAN PESANTREN

Setidaknya terdapat lima topik utama yang diungkap berdasarkan pandangan para nyai terkait tema ke-nyai-an dan pesantren:

1. gelar ke-nyai-an,
2. lingkup otoritas seorang nyai,
3. fenomena ketaatan masyarakat pada sosok nyai,
4. posisi perempuan di pesantren, dan



5. manajemen gender di pesantren.

Terkait gelar ke-nyai-an, Nyai Hamdanah mengatakan bahwa gelar ke-nyai-an disematkan karena dua hal: keilmuan dan tradisi. Yang kedua biasanya diberikan kepada siapapun yang menikah dengan seorang kiai, walaupun tidak memiliki kompetensi keilmuan yang mumpuni. Khusus di Madura, menurut nyai Azizah, faktor keturunan merupakan faktor utama seseorang disebut sebagai nyai disbanding dengan faktor kompetensi keagamaan. Sedangkan yang pertama, seseorang bisa disebut nyai karena ke-*'alim*-annya, walaupun bukan seorang istri kiai. Dari kriteria pertama ini, menurut Nyai Hamdanah, seorang perempuan tentu bisa disejajarkan dengan para ulama lain dari kaum laki-laki. Dalam konteks ini, Nyai Najma memperjelas bahwa keilmuan yang dimaksud adalah ilmu agama, di samping ilmu/ wawasan kemasyarakatan lainnya.

Berbeda dengan kedua nyai di atas, Nyai Luluk justru melihat prediket ke-nyai-an murni subjektifitas masyarakat. Seperti halnya ke-kiai-an, tidak ada standar kapan seseorang bisa disebut nyai, karena prediket tersebut muncul dari masyarakat dan hanya masyarakat yang pada akhirnya memilih siapa yang pantas disebut nyai. Di Madura sendiri, menurut kiai Darwis, panggilan kiai-nyai justru terlihat lebih *rigid*, dimana secara budaya, panggilan tersebut disematkan khusus bagi keluarga *dalem* pesantren dan menjadi tidak beradab secara moral kemasyarakatan ketika memanggil mereka dengan sebutan lain, semisal “ustadz/ ustadzah” karena dianggap menyamakan kedudukan mereka dengan para *asatadz* (guru-guru pengajar di pesantren).

Faktor lain yang tidak kalah penting untuk menjadi seorang nyai adalah kiprah para perempuan tersebut di masyarakat. Karena “*di rumah terus hanya soleh secara pribadi, tidak soleh secara sosial. Ya masyarakat tidak (menganggapnya sebagai seorang nyai).*” Hal ini diamini oleh Kiai Darwis yang berpendapat bahwa prediket ke-nyai-an tidak jauh berbeda dengan ke-kiai-an, di mana pengabdian dan ketulusan mengajar serta keterlibatan dalam berbagai kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan merupakan menjadi sorotan utama penentu ke-kiai-an dan ke-nyai-an tersebut. Sejalan dengan hal tersebut Nyai Najma menambahkan bahwa factor pendukung ke-nyai-an adalah kepemilikan power/ pengaruh kuat menggerakkan masyarakat untuk merubah kondisi sosial menjadi lebih baik. Nyai Luluk dalam hal ini mempunyai pandangan yang berbeda. Beliau menyatakan bahwa hal tersebut tergantung budaya di mana sosok nyai tersebut berada. Membandingkan antara sosok nyai di daerah Tebuireng dan Pandalungan, Nyai Luluk memaparkan bahwa:

bu nyainya itu sangat berbeda dengan model bu nyai pandalungan sini. Kalau bu nyai sana itu (Tebuireng) pertama tidak perlu dekat dengan masyarakat, tidak perlu, dia tidak penting harus pengajian sana sini. Paling dia lebih terlibat di LSM. Terus karena masyarakat di (daerah)kulon/barat itu lebih banyak pegawai pabrik atau apa, dia tidak mensyaratkan bu nyainya itu, atau istri seorang kyai, atau anak seorang kyai berpakaian berprilaku seperti yang diharapkan orang timur pada seorang bu nyai. Kalau (di daerah) pandalungan itu sosok bu nyai pasti dianggap agamanya harus jauh (lebih baik). Secara moral dia harus menjadi panutan. Secara fisik, dandanannya fisik itu jadi sorotan. Bagaimana dia berkrudung, bagaimana dia bertingkah selalu di awasi dan di harapkan tidak keluar dari ekspektasi mereka dari seorang ibu nyai. Jadi lebih terikat.

Seseorang yang menyandang gelar nyai, tentunya memiliki lingkup sejauh mana otoritas yang dimilikinya. Menanggapi hal ini, Nyai Hamdanah mengungkapkan bahwa hal paling esensial bagi seorang ulama, baik itu laki-laki atau perempuan adalah memegang amanah keilmuannya. Selama ia berpegang teguh pada al-Quran dan Hadis, ia memiliki otoritas untuk mengatakan mana yang benar dan mana yang salah. Dalam hal ini, Nyai Hamdanah sekali lagi mengingatkan, “*perempuan juga punya hak untuk mengatakan bahwa ini benar dan ini salah.*” Dengan otoritas yang dimilikinya, para nyai tidak jarang turut dilibatkan dalam berbagai kegiatan keagamaan yang ada di masyarakat. Di Madura sendiri, menurut nyai Azizah, para nyai dilibatkan dalam acara-acara seperti pernikahan, sunatan, peringatan maulid Nabi dan lain-lain.

Dalam hal ini, kiai Darwis menggarisbawahi bahwa sesungguhnya tidak semua nyai memiliki otoritas keagamaan, terutama mereka yang digelari nyai berdasarkan trah ataupun karena dipersunting oleh kiai. Hal ini terbukti, menurut kiai Darwis, dari banyaknya nyai yang tidak mampu mengajar kitab-kitab kuning level tinggi. Lebih lanjut, bagi mereka yang memang memiliki otoritas keagamaan, ruang lingkup mereka di masyarakat sangat ditentukan oleh kondisi kultur setempat. Di Madura, kiai Darwis mencontohkan, tidak banyak bu nyai tampil berdakwah di masyarakat yang jamaahnya heterogen terdiri dari laki dan perempuan. walaupun mereka mempunyai otoritas keagamaan yang diakui. Karena masih ada dari kalangan masyarakat umum yang menganggap tabu tampilnya seorang perempuan di hadapan laki-laki. Walaupun ada beberapa orang nyai yang pendakwah (*muballighah*) yang masih tampil di masyarakat umum. Hanya saja, kiai Darwis menggaris bawah:

dalam acara-acara yang diadakan di lingkungan pesantren, khususnya di pesantren-pesantren besar, para kiai jarang bahkan tidak pernah mengundang seorang muballighah, se-'alim apapun muballighah tersebut. kecuali jika acara tersebut dikhususkan untuk para perempuan.

Mengenai ketaatan masyarakat terhadap sosok Bu Nyai, Nyai Hamdanah membedakan fenomena ini berdasarkan budaya setempat. Ia mencontohkan bahwa di Madura, ketaatan masyarakat kepada sosok bu Nyai lebih karena tradisi yang ada di Madura di mana kalangan kiai secara kultural memiliki tempat yang lebih tinggi di masyarakat. Pendapat ini turut diamine oleh nyai Azizah yang secara gamblang menyatakan bahwa ketaatan masyarakat terhadap sosok nyai di Madura muncul karena faktor keturunan sebagai anak dari bapak dan ibu keluarga kiai. Kompetensi keilmuan bu nyai dalam hal ini bukanlah factor penentu utama. Dasar ketaatan ini kemudian menentukan apakah kemudian sosok nyai tersebut pantas atau tidak pantas diberi ruang untuk memberikan ceramah-ceramah keagamaan di masyarakat umum.

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Nyai Najma dan Nyai Luluk berpendapat bahwa ketaatan masyarakat sejatinya berangkat dari keyakinan masyarakat terhadap kualitas spiritualitas keagamaan sosok seorang nyai. Nyai Najma menjelaskan bahwa para nyai adalah sosok yang identik dengan orang yang memiliki tingkat kedekatan diri yang lebih kepada Allah, orang yang demikian akan memiliki sir/ karisma/ haibah



tersendiri pada org lain. Sehingga energi positif yang ada pada nyai dengan sendiri akan direspon baik oleh masyarakat sekitarnya.

Hal menarik lainnya terkait isu ke-nyai-an dan pesantren adalah posisi perempuan di pesantren. Menanggapi hal ini, menarik mendengar penjelasan nyai Azizah di pesantren yang dikelolanya, bahwa:

Di pesantren saya, perempuan itu selalu diposisikan nomor dua setelah laki-laki. Menurut pandangan keluarga, sepintar apapun perempuan, pasti laki-laki berada di atasnya. Kalau kitab yang diajarkan di pesantren, mayoritas menjelaskan bahwa perempuan harus mengikuti apa kata lakiclaki (suami), tidak boleh membantah.

Pengalaman nyai Azizah di atas diperinci oleh kiai Darwis yang secara yakin menyatakan bahwa

faktanya yang saya temukan di beberapa pesantren, katakanlah di Madura, di beberapa pesantren besar, tidak ada yang mereduksi perannya perempuan. kiai-kiai malah bangga kalau santri putri diajar bu nyainya. Tidak ada yang namanya kiai melarang istrinya mengambil peran di pesantren. Malah dianjurkan. Hanya, peran apa? Ngajar, ngajar di mana? kalo ngajar di depan santri putra, ya itu yang tidak boleh.

Berbeda dengan pengalaman nyai Azizah di Madura, Nyai Hamdanah menjelaskan berdasarkan apa yang beliau terapkan di pesantren yang dipimpinnya di mana pendidikan keadilan dan kesetaraan gender menjadi salah satu nilai utama di pesantren. Hal tersebut diaplikasikan dalam bentuk, misalnya, dalam acara yang dihadiri oleh laki-laki dan perempuan, bu nyai memimpin doa dalam acara tersebut, sedangkan kiai memberikan ceramahnya. Nyai Hamdanah menjelaskan bahwa inisiatif semacam itu:

kelihatannya orang menganggap hal kecil. Tapi ini juga bagian dari pendidiknya yang ditanamkan pada santri bahwa orang yang selama ini kadang-kadang yang menganggap.. kalau ada laki dan perempuan kemudian perempuan disuruh doa, loh masih ada laki-laki. Biar yang laki-laki aja. Menurut saya ya sebetulnya ya itu tadi bahwa posisi kita sebagai hamba Allah itu sama, artinya tidak ada pembedaan antara laki dan perempuan kecuali hanya karena taqwa itu. Jadi anggapan manusia secara umum, masih menganggap bahwa do'a yang paling di mustajab itu dari bapak-bapak itu yang sampai sekarang masih terjadi. jangan kemudian dengan tampilnya yang doa yang laki-laki, dianggap yang laki-laki itu yang paling taqwa, laki-laki itu yang paling hebat, laki-laki itu yang ulama. Itu stereotipe yang sebetulnya perlu dievaluasi.

Bentuk lain pendidikan kesetaraan gender yang diterapkan oleh Nyai Luluk di pesantren yang beliau pimpin adalah kegiatan piket menyapu. Menurut beliau, bahwa santri laki-laki juga harus menyapu kamar mereka sendiri, karena selain hal tersebut adalah bentuk tanggung jawabnya sebagai anggota kamar, penugasan tersebut juga untuk mengajarkan bahwa menyapu bukan hanya tugas khusus perempuan. Dalam konteks posisi perempuan di pesantren, nyai Najma mengingatkan bahwa:

Pada dasarnya laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam mencari ilmu, mengaktualisasikan ilmu, memiliki akses yang sama dalam mendapatkan

peluang-peluang, sejauh relasi keduanya seimbang dalam mendapatkan hak dan melangsungkan tanggung jawabnya tidak ada masalah. Yang akan bermaslah jika potensi-potensi yang dimiliki perempuan/ laki-laki di tumpulkan atau malah ditutup akses dalam berkiprah di pesantren, masyarakat, politik.

Terkait dengan manajemen gender di pesantren, menarik untuk diungkap di sini bahwa para nyai menyadari pentingnya pesantren memberikan kesempatan yang sama untuk berperan baik bagi santri laki-laki maupun perempuan, serta penting bagi pesantren untuk bisa mengajarkan ajaran-ajaran Islam secara seimbang. Karena sebagaimana diakui oleh nyai Azizah, kadang santri perempuan memiliki pikiran-pikiran yang lebih inovatif dibanding santi laki-laki. Pentingnya bagi pesantren untuk mengajarkan ajaran Islam yang seimbang dicontohkan oleh Nyai Hamdanah, misalnya, tentang fiqh menjadi imam. Menurut beliau, memang ada aturan bahwa yang boleh jadi imam adalah laki-laki. Tetapi hal tersebut bukan berarti perempuan tidak boleh sama sekali menjadi imam dalam keadaan apapun, karena ada hadis lain yang mengungkapkan bahwa barang siapa yang sah untuk mengerjakan sholat maka ia juga sah menjadi imam sholat. Hadis ini mencakup bagi laki-laki maupun perempuan. Pembahasan semacam ini, menurut Nyai Hamdanah, yang juga harus dimunculkan. Sehingga para santri tidak mendapatkan pemahaman fiqh yang bias gender. Dalam konteks substansi pengajaran yang komprehensif (baca: tidak bias gender), Nyai Najma secara optimis menyatakan bahwa:

Untuk saat ini beberapa pesantren sudah mulai membuka diri dalam artian mulai mengkaji kitab-kitab dengan interpretasi yang seimbang. Kitab2 atau materi2 kajiannya sdh lebih kontemporer. Karena pada kenyataannya kaum perempuan saat ini sudah menunjukkan kemampuannya yang tidak kalah baiknya dari laki-laki. Hanya sebagian saja sayup2 masih ada pesantren yang melestarikan kajian kitab2 yang dalam penyampaiannya sering kali medskridtkan, memarginalkan perempuan.

EKSISTENSI NYAI DALAM KONTEKS BUDAYA PANDALUNGAN

Budaya Pandalungan adalah budaya hybrid yang muncul karena persatuan dua masyarakat dengan background kebudayaan yang berbeda; Jawa dan Madura. Keduanya saling mempengaruhi, dan di saat yang sama, keduanya saling bertahan mempertahankan kekhasan kebudayaan masing-masing sehingga membuat sebuah “orchestra kebudayaan” yang unik dan indah (Raharjo, Pendhalungan: Sebuah ‘Periuk Besar’ Masyarakat Multikultural, 2015). Memahami eksistensi nyai di tengah budaya Pandalungan berarti memahami eksistensi sosok perempuan menurut dua kebudayaan: Jawa dan Madura. Menanggapi pertanyaan mengenai eksistensi para nyai di area budaya Pandalungan, Nyai Hamdana menjelaskan bahwa hal tersebut tergantung dari background masyarakatnya, apakah Jawa atau Madura. Jika di kawasan masyarakat yang notabene berasal dari kultur Madura, maka posisi nyai tetap lah no kedua setelah kiai. Fanatisme patriarkal bagi masyarakat latar belakang Madura hal ini masih sangat terasa. Hal ini dikonfirmasi oleh nyai Azizah yang menyatakan bahwa di Madura:

perempuan itu nomor dua dan tidak bisa melampaui laki-laki kecuali mereka yang hidup di perkotaan.



Namun, menurut nyai Najma, tidak selalu seperti itu. Ia menjelaskan:

Madura yang mana dulu nih. Madura yang seperti sy sih sudah merdeka ya..tapi kalau madura yang lain misal di pulau madura sana beberapa daerah didalamnya masih ada masyarakat yang mentradisikan nikah usia anak-anak, menjodohkan anak yang masih dalam kandungan, poligami dan tindakan-tindakan yang melemahkan perempuan.

Dalam konteks masyarakat Madura, menarik mendengar pernyataan kiai darwis tentang adagium Madura yang menyatakan bahwa untuk perempuan “*kenengna kenengin, lakonna lakonnin*” (tempatnyanya ditempatkan, perannya diperankan). Artinya bahwa perempuan mempunyai tempat dan peran yang harus diperankan yang bisa jadi berbeda dari laki-laki namun semua itu menuju jalan yang sama, yaitu ridho Allah. Di sisi lain, menurut kiai Darwis, bahwa ada beberapa kalangan kiai di Madura yang memang cenderung “menikmati” fenomena subordinasi perempuan. hal ini bisa disebabkan karena sosok kiai tersebut yang masih mewarisi faham patriarkal dan tidak membuka wawasan bahkan cenderung menutup dari diskusi-diskusi peran perempuan yang setara dengan laki-laki. Hal tersebut kemudian membudaya khususnya di antara komunitas mereka sendiri sehingga orang-orang yang ingin keluar dari budaya patriarkis tersebut, pada akhirnya, akan merasa tabu, asing, dan aneh sendiri.

Berbeda dengan masyarakat Madura, masyarakat yang tinggal di daerah kota Jember dengan berbagai background yang sudah saling menyatu satu sama lain, eksistensi perempuan dalam masyarakat tersebut terlihat lebih dinamis. Hal ini juga yang dirasakan oleh Nyai Luluk dimana background kebudayaan masyarakat sangat menentukan pola pikir mereka terkait tentang eksistensi perempuan.

Terkait dengan eksistensi perempuan khususnya di kebudayaan Jawa, Nyai Hamdanah memaparkan bahwa wanita di kebudayaan Jawa berasal dari kata *wani ditata* (mau diatur). Menariknya, bagi beliau, seharusnya tidak berhenti di situ, tapi juga *lan wani noto* (tetapi juga harus mau mengatur). Implikasi lebih jauhnya, bahwa:

Prinsip untuk menegakkan kebenaran itu bukan hanya dari pihak bapak tapi juga dari pihak ibu.

KESIMPULAN

Sesungguhnya Islam mengakui otoritas keagamaan perempuan sebagaimana ia juga mengakui otoritas keagamaan kaum laki-laki. Keduanya memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi hamba Allah terbaik melalui berbagai peranan yang dimainkan oleh masing-masing. Pembagian peran ini lah yang kemudian sangat kental dengan nuansa budaya, di mana budaya secara signifikan mengkonstruksi detail model peranan yang dapat dimainkan oleh masing-masing entitas. Kasus otoritas keagamaan nyai Pandalungan menunjukkan bahwa sesungguhnya otoritas keagamaan perempuan yang berada dalam sebuah lingkup kebudayaan local sejatinya tidaklah se-rigid yang disangkakan, tetapi justru ia terkonstruksi secara dinamis. Dinamika tersebut, menurut peneliti, disebabkan oleh adanya gap antara idealisme teologis dan realitas kebudayaan setempat serta negosiasi yang alot antar keduanya terkait sosok perempuan muslimah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, F. M. (2002). Tesis. *Ibu Nyai dan Perubahan Sosial Pesantren: perempuan dalam struktur sosial pesantren AlMunawwir Krapyak Yogyakarta*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Barlas, A. (2002). *“Believing Women” in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur’an*. Austin: University of Texas Press.
- Bhasin, K. (2001). *Memahami Gender*. (M. Z. Hussein, Trans.) Jakarta: Teplok Press.
- Dhofier, Z. (1982). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Faishol, M. (2011). *Hermenutika Gender: Perempuan dalam Tafsir Bahr al-Muhith*. Malang: UIN-MALIKI Press.
- Nagata, J. (1982, Maret). Islamic Revival and the Problem of Legitimacy Among Rural Religious Elites in Malaysia. *Man*, 17(1), 42-57.
- Smith, B. J., & Woodward, M. (2013). Introduction: de-colonizing Islam and Muslim feminism. In B. J. Smith, & M. W. (eds.), *Gender and Power in Indonesian Islam: Leaders, Feminists, Sufis and Pesantren Selves*. Routledge.
- Rahman, F. (1979). *Islam*. The Chicago University Press.
- Srimulyani, E. (2012). *Women from Traditional Islamic Educational Institutions in Indonesia: Negotiating Public Spaces*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Umar, N. (1999). *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Wadud, A. (1999). *Quran and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press.

